

**Pokok-pokok Hasil Seminar Nasional  
MENYELAMATKAN REFORMASI DENGAN MORAL DAN ETIKA  
di Lemhannas, Jakarta, 16 April 2008**

**Pendahuluan**

Reformasi telah berjalan sepuluh tahun, namun harapan besar atas hasil reformasi belum sepenuhnya tampak. Salah satu penyebabnya adalah karena banyak pelaku dalam penyelenggaraan negara, baik di pusat maupun di daerah, telah mengabaikan cara-cara yang tidak sesuai dengan moral dan etika.

Kondisi saat ini memang memprihatinkan dan belum seperti yang diharapkan, namun sebenarnya reformasi di Indonesia telah menghasilkan capaian-capaian yang cukup mendasar, dan telah membuka kebebasan dari cengkeraman rezim otoriter untuk menuju penyelenggaraan negara yang demokratis.

Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menyelamatkan reformasi dengan moral dan etika yang diharapkan dapat mencapai hasil sesuai harapan rakyat dan agar reformasi berjalan pada rel yang benar.

Dalam rangka inilah pada tanggal 16 April 2009 The Fatwa Center (tFC) telah menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Menyelamatkan Reformasi dengan Moral dan Etika,” yang diikuti oleh para politisi, akademisi, perwakilan peserta program pendidikan di Lemhannas, praktisi hukum dan ekonomi, pemimpin Ormas, serta aktivis LSM, yang menghadirkan panelis: Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, Drs. Mar’ie Muhammad, Drs. Taufiequrrachman Ruki, SH, Drs. Christianto Wibisono, dan Dr. Anies R. Baswedan, dengan pembicara kunci Prof. Dr. Juwono Sudarsono. Seminar Nasional ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat negara seperti Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, dan beberapa Duta-besar/Perwakilan negara sahabat.

**Pokok-Pokok Permasalahan**

1. Pada saat ini dirasakan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari secara utuh dan benar berlandaskan moral dan etika, kemanusiaan yang komprehensif, persatuan dalam ikatan kebhinekaan, prinsip musyawarah/mufakat dalam penciptaan konsensus dalam keberagaman, dan keadilan sebagai elemen penting bagi kestabilan dan pertahanan negara.

Oleh karena itu, semua warga negara, terutama para penyelenggara atau pejabat negara harus menjadikan transformasi nilai-nilai Pancasila sebagai kewajiban umum yang bisa dipertanggungjawabkan.

2. Kebebasan sebagai buah dari reformasi terkadang dilakukan melewati batas-batas demokrasi, dan pemaksaan kehendak, serta penunggalan kebenaran atas persepsi masing-masing. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berada dalam keberagaman, pengakuan terhadap perbedaan merupakan prasyarat mutlak. Yang perlu dikembangkan adalah membangun konsensus di atas perbedaan-perbedaan yang kurang prinsipil bagi kontinuitas pembangunan dan masa depan bangsa yang didasari oleh prinsip penghormatan (*respect*) satu sama lain. Dalam kritik perlu ada solusi yang harus disampaikan secara santun agar menghasilkan perubahan yang diharapkan.

Oleh karena pluralitas itulah diperlukan transformasi dan aplikasi nilai-nilai moral dan etika secara tepat agar produktif.

3. Penegakan supremasi hukum merupakan upaya menghilangkan praktik KKN yang pada saat ini masih merajalela. KKN terjadi akibat sistem sosial, budaya, pendidikan, administrasi pemerintahan, dan sumber daya manusia yang tidak baik karena telah terdistorsi oleh materialisme dan konsumerisme. Masyarakat telah beralih dari berpegang kepada nilai-nilai luhur kepada pemujaan materi. Aparat birokrasi di tingkat kelurah-

an/desa sampai tingkat atas masih bertindak sebagai *ambtarnaar* (pangreh praja), belum menempatkan diri sebagai abdi masyarakat, juga masih banyak yang melakukan KKN.

Untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut, perlu ditempuh dengan gerakan penguatan moralitas dan etika, serta otoritas penegakan hukum yang kuat. Lebih jauh, pembuatan undang-undang harus dilaksanakan dengan benar, sehingga implementasinya tidak banyak mengalami kendala.

4. Salah satu hal yang terlewatkan dalam mengawal reformasi adalah melahirkan aturan baru sebagai sebuah sistem dalam penyelenggaraan negara. Reformasi selama ini banyak diartikan oleh sementara orang cenderung sebagai liberalisme, yang sering melahirkan konflik, kerusuhan, dan bentrokan.

Oleh karena itu, dalam menciptakan praktik politik yang bermoral dan beretika diperlukan sistem dan mekanisme yang menunjang atau bahkan memaksa pelaksanaan sistem. Sistem itu diharapkan dapat menunjukkan kepada publik mengenai kualitas moral dan etika aktor-aktor politik atau elite-elite politik. Sebagai contoh: sistem *voting* harus dilakukan secara terbuka. Selain itu, pengambil kebijakan baru harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam menentukan pembantu-pembantunya, sehingga visi politiknya dapat diterjemahkan dan diimplementasikan dengan baik.

5. Dewasa ini ada stigma bahwa politik itu kejam dan kotor, penuh trik dan intrik, mengungting dalam lipatan, dan sebagainya. Anggapan itu perlu didekonstruksi agar politik dipandang sebagai hal yang baik. Salah satu cara adalah menanamkan dan menumbuhkan-kembangkan prinsip moral dan etika kepada politisi (muda) dan pemimpin lokal sebagai calon pemimpin nasional.

### **Kesimpulan**

1. Apabila reformasi tidak dikawal dan diselamatkan akan mengalami kegagalan dan akan sangat mengecewakan rakyat serta membahayakan stabilitas nasional.
2. Salah satu penyebab lambannya pencapaian tujuan reformasi adalah miskinnya moralitas dan etika dari mereka yang diberi amanah melaksanakan aspirasi dan kehendak rakyat, dan lemahnya penanganan terhadap pelanggaran.
3. Untuk melahirkan politisi yang bermoral dan beretika, perlu dibangun sistem dan dijadikan parameter mana politisi yang bermoral dan beretika dan mana yang tidak.
4. Pola hidup konsumerisme dan materialisme telah menimbulkan maraknya KKN.

### **Rekomendasi**

1. Digalakkan kembali pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara, agar nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Penegakan hukum harus dilakukan lebih tegas dan lugas dengan prinsip *reward* dan *punishment* yang lebih bermakna. Ini lebih diutamakan bagi penyelenggara negara dan aparat pemerintah dari strata rendah sampai di atas. Para pemimpin sendiri harus dapat memberi contoh dan menjadikan dirinya sebagai contoh teladan yang baik.
3. Dibangun sistem dan mekanisme institusional yang dapat menunjukkan secara terbuka pejabat negara dan atau politisi yang bermoral dan beretika dan atau yang tidak bermoral/beretika.
4. Gerakan hidup sederhana perlu dihidupkan dan digalakkan kembali.

Jakarta, 17 April 2008

**Dr. Abdoel Fattah**  
Direktur Eksekutif